

PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAMPUNG PEMULUNG ALBARAYA BEKASI

Sayyid Sayyaf¹, Wiryono Raharjo², Oktira Susetyaningtyas³

¹Jurusan Arsitektur, Universitas Islam Indonesia

¹Surel: 18512083@students.uii.ac.id

ABSTRAK: *Permukiman kumuh merupakan permasalahan perumahan yang umum terjadi di kota metropolitan dan timbul akibat lonjakan jumlah penduduk yang dialami oleh masyarakat dengan ekonomi rendah yang sampai sekarang masih menjadi sorotan bagi pemerintah di sejumlah daerah di Indonesia termasuk di kelurahan Bintara Jaya dan Jakasampurna kota Bekasi yang merupakan kawasan paling kumuh karena berdiri berdampingan dengan tempat pembuangan sampah. dan sekarang lebih dikenal dengan nama kampung pemulung karena masyarakat disana sehari-hari berprofesi sebagai pemulung. Banyak sekali permasalahan yang ada di lokasi, mulai dari lingkungan yang tidak sehat, sungai yang tercemar, dan juga rumah hunian yang sangat jauh dari kata layak. Maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui strategi desain dan solusi untuk menata kembali lingkungan hunian kumuh kampung Albaraya dengan memaksimalkan program yang ada seperti program KOTAKU. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dilengkapi dengan studi preseden sehingga memberikan rekomendasi-rekomendasi dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi desain dan solusi untuk perkumuhan kampung pemulung yang kumuh menjadi kawasan yang layak untuk dihuni.*

Kata kunci: Penataan, Permukiman Kumuh, program KOTAKU

PENDAHULUAN

Tinggal di permukiman yang layak huni merupakan impian dari banyak orang, terlebih di daerah yang memiliki tingkat kepadatan yang tinggi seperti daerah ibukota dan kota metropolitan lainnya. Ketersediaan lahan yang sedikit dan tingginya harga tanah serta bahan bangunan menjadikan sulitnya masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah untuk mempunyai rumah yang layak huni, sehingga dari sini munculah banyak permukiman-permukiman kumuh yang berdiri seadanya dan berada dimana saja, hal ini diperparah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, dengan banyaknya orang desa yang mencari penghidupan yang lebih layak dengan berpindah ke kota besar dan berharap dapat merubah nasib menjadi lebih baik. Namun kenyataan yang ada tak selalu seperti yang diharapkan kaum urbanis ketika tiba di kota, tingginya daya saing dan mahal biaya hidup menjadikan banyak orang bekerja serabutan dengan pendapatan yang sangat rendah dan juga terlantar karena tak kunjung jua mendapatkan tempat tinggal, hal inilah yang menyebabkan tingginya kebutuhan permukiman yang layak, dan permasalahan ini merupakan sesuatu yang umum melanda kota-kota metropolitan di Indonesia salah satunya di kota Bekasi.

Setidaknya terdapat lebih dari 329 hektare permukiman kumuh yang ada di kota Bekasi, dan yang terparah berada di kelurahan Bintara Jaya, dimana disana berdiri lebih dari 3,34 hektare rumah kumuh yang sangat tidak layak huni karena berdiri berdampingan dengan tumpukan sampah. Lokasi ini juga merupakan kawasan yang paling kumuh di kecamatan Bekasi barat, dari luas total permukiman kumuh di kelurahan Bintara Jaya: 141.78 H dan Jakasampurna: 281.48 H dan total permukiman kumuh di kecamatan Bekasi Barat adalah 920.65.

Tempat ini dulunya adalah lahan kosong milik PT. Albaraya yang sekarang dipegang oleh kementerian keuangan, setelah itu menjadi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan mulai dihuni oleh para perantau yang tidak dapat pekerjaan sehingga terpaksa bekerja sebagai pemulung, para perantau kebanyakan berasal dari daerah pantura seperti Karawang, Cirebon



Gambar 1. Tampak atas kampung pemulung Albaraya

Sumber : www.metro.sindonews.com diakses pada 15 juni 2021

dan juga ada yang dari madura, lambat laun sejalan dengan tingginya urbanisasi ke kota menyebabkan lahan kosong Albaraya menjadi satu komunitas pemulung yang dihuni kurang lebih 700 KK dan lebih dikenal dengan sebutan kampung pemulung Albaraya.

Belum banyak program yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan kampung pemulung Albaraya, baik dari pihak pemerintah daerah maupun dari swasta, sehingga sampai sekarang predikat kampung terkumuh masih melekat di kawasan tersebut, serta pandemi covid saat ini menambah parah keadaan disana, kawasan kotor yang tidak layak huni dan kepadatan rumah yang tinggi menyebabkan masifnya penularan virus, selain itu banyak timbul penyakit ISPA pada warga yang tinggal disana. Hal ini perlunya menjadi sesuatu yang harus segera dibenahi dan menjadi perhatian dari pihak pemerintah, penataan kawasan ini menjadi sangat penting dilakukan mengingat kondisi tiap tahun yang kian parah, penataan berupa rekomendasi desain kawasan dan hunian yang layak huni dan mengusung tinggi *sustainability development* dengan metode dan pendekatan yang ampuh salah satunya dengan memaksimalkan program KOTAKU, yaitu program penanganan permukiman kumuh oleh pemerintah dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dari pemaparan diatas maka rumusan masalah pada kasus ini dapat disusun menjadi permasalahan umum dan permasalahan khusus.

Permasalahan umumnya adalah:

- Bagaimana strategi yang baik untuk menata kembali permukiman kumuh di kampung pemulung Albaraya Bekasi?.

Kemudian permasalahan khususnya adalah:

- Bagaimana menata lingkungan kampung pemulung Albaraya sehingga menjadi lingkungan yang sehat untuk ditinggali?.
- Bagaimana menata dan membuat rumah hunian yang layak untuk ditinggali masyarakat pemulung di kampung tersebut?.
- Metode dan pendekatan apakah yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh di kampung pemulung Albaraya ini?.

Tujuan utama dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui strategi dan solusi yang jitu untuk menata kembali kampung pemulung Albaraya Bekasi, sehingga menjadi kawasan yang layak untuk dihuni.

KAJIAN PUSTAKA

▪ Permukiman Kumuh

Permukiman merupakan kumpulan rumah hunian dengan sarana dan prasarana lingkungannya, sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang dimana kondisi rumah dan lingkungannya sangat buruk dan jauh dari standar yang sudah ditetapkan, baik itu standar akan kepadatan bangunan, standar fasilitas air bersih, standar rumah sehat, standar infrastruktur lingkungan dan masih banyak lagi (Kurniasih, 2007).

Ciri-ciri permukiman kumuh menurut Simulingga (2005) adalah:

1. Kepadatan penduduk yang sangat tinggi yaitu antara 250-400 jiwa/ha.
2. Akses jalan yang sangat sempit sehingga tidak dapat dilalui kendaraan roda 4.
3. Tidak memadainya fasilitas akan drainase kawasan sehingga mudah tergenang air.
4. Sanitasi air kotor yang buruk, dan kebanyakan membuangnya ke sungai terdekat.
5. Infrastruktur air bersih yang buruk

▪ Program KOTAKU

KOTAKU adalah singkatan dari Kota Tanpa Kumuh, yaitu salah satu program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menangani permasalahan permukiman kumuh di Indonesia khususnya di daerah perkotaan. Program ini mendukung gerakan 100% air layak minum, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi yang layak, biasa disingkat dengan gerakan 100-0-100. Program ini didanai oleh pemerintah, swadaya masyarakat, *stakeholder* dan lembaga lainnya yang bermitra dengan pemerintah.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk mewujudkan permukiman di perkotaan yang produktif, layak huni dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan akan infrastruktur dan pelayanan pada permukiman kumuh sehingga mencegah munculnya permukiman kumuh yang lainnya.

▪ Studi Preseden (Desa warna-warni Jodipan, Malang)



Gambar 2. Sudut kampung warna Jodipan Malang

Sumber: www.travel.okezone.com diakses pada 15 Juni 2021

Kota Malang selalu memiliki daya tarik yang tak ada habisnya, sehingga tak pernah sepi, Mulai dari wahana bermain, wisata alam hingga desa wisata selalu eksis untuk dijadikan destinasi wisatawan dari berbagai daerah, dan salah satunya adalah desa warna warni ini.

Histori

Pemukiman warga yang memanjakan mata ini dulunya merupakan kawasan permukiman kumuh yang memiliki banyak permasalahan lingkungan, sampah dan lingkungan yang kumuh merupakan masalah yang utama, pasalnya desa ini terletak di sempadan sungai dan jauh dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Juga kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan rendahnya pengetahuan warga dalam mengolah sampah menjadikan terbentuknya perilaku membuang sampah sembarangan di sungai, sehingga lingkungan di desa ini menjadi kotor dan tercemar, sampah yang dibuang banyak yang tersangkut di sempadan sungai dan tidak hanyut oleh air, menimbulkan aroma yang sangat tidak sedap untuk dicium.

Rendahnya kesadaran warga desa Jodipan akan pentingnya menjaga lingkungan juga sangat berdampak pada buruknya sanitasi desa, sampah yang tidak diolah dengan benar dan masih banyaknya rumah yang tidak memiliki ruang MCK menjadikan sanitasi desa sangat kotor, padahal perihal aktivitas MCK sangat erat kaitannya dengan Kesehatan dan kebersihan pribadi dan lingkungan, jika tidak segera dibenahi akan sangat berdampak buruk kedepannya.



Gambar 3. Sebelum dan Sesudah desa Jodipan dibenahi

Sumber: www.idntimes.com diakses pada 15 juni 2021

Isu lain dari desa Jodipan ini adalah kurangnya ruang terbuka hijau (RTH) di desa ini, disebabkan oleh padatnya pemukiman warga, karena lahan yang ada selalu dibangun untuk hunian, dan kini hanya ada satu ruang terbuka berupa lapangan di desa Jodipan ini.

Proses Penataan Desa

Pemerintah kota Malang pernah mewacanakan untuk menggusur desa ini karena letaknya yang berada di bantaran sungai yang seharusnya area tersebut bebas dari bangunan, hal ini telah dijelaskan dalam PERMEN (Peraturan Pemerintah) NO 38/2011. Hal tersebut tidak jadi dilakukan karena datangnya komunitas mahasiswa yang memberi inovasi dalam mengelola desa Jodipan. Mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi UMM yang tergabung dalam komunitas bernama Guyspro ini melakukan riset tentang desa Jodipan ini dan kemudian mengadakan sebuah event yang diadakan di lapangan desa, riset yang dilakukan mahasiswa tersebut berkaitan dengan permukiman kumuh dan mendapat kesimpulan bahwa desa ini masuk pada kategori permukiman yang kumuh di kota Malang, setelah itu Guyspro mengadakan Kerjasama CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan perusahaan cat terkenal di Malang yaitu PT. Indiana, dimana akhirnya didapatkan hasil kesepakatan antara warga desa Jodipan dan PT. Indiana untuk mengecat ulang secara gratis rumah warga di sana dalam jangka waktu 2 tahun, dari sinilah wajah baru desa Jodipan muncul dan berkembang hingga saat ini menjadi desa wisata.

Etika Permakultur

Wajah baru desa Jodipan memberi dampak yang sangat baik, dengan memberi warna-warna yang cerah pada atap dan dinding rumah serta sarana desa sehingga menjadi berwarna dan indah untuk dipandang menjadi stimulus pada pola perilaku warga desa Jodipan menjadi lebih baik, lambat laun perilaku warga yang dulunya suka membuang sampah sembarangan ke sungai mulai berkurang dan menghilang, karena warga akan sangat malu jika desa yang sudah bersih dan berwarna tetapi masih ada sampah yang berserakan dimana-mana, terutama di sungai. Sampah-sampah yang tadinya sering dibuang ke sungai dimanfaatkan kembali untuk memperindah tampilan desa Jodipan, seperti botol-botol bekas yang disusun menjadi ikon bertuliskan identitas desa Jodipan, hal ini berjalan lurus dengan etika permakultur yang merubah sesuatu yang kotor menjadi aset dan sangat bernilai, juga memberi dampak yang baik pada lingkungan hidup.

Setelah mendapatkan banyak sentuhan, baik fisik desa Jodipan juga pola perilaku masyarakat yang kian baik menjadikan label kumuh desa Jodipan menghilang dan digantikan dengan label desa wisata, sehingga Pemkot Kota Malang menetapkan desa ini sebagai Aset wisata di kota Malang yang terus menarik pengunjung tiap tahunnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yang menjelaskan bagaimana strategi penataan kawasan permukiman kumuh di kampung pemulung Albaraya, yaitu dengan menampilkan kesimpulan dan saran dari fenomena yang diselidiki setelah mengumpulkan data-data yang ada, baik data yang didapat dari penelusuran di lapangan maupun pencarian data melalui internet. Adapun data yang dikumpulkan langsung di lapangan berupa data terkait kondisi existing, sejarah terbentuknya kawasan, data (jumlah, profesi, dan aktivitas) penduduk, dan data visual berupa gambar dan video, sedangkan data yang dikumpulkan melalui internet

berupa preseden, kajian teori dan data-data yang menunjang apa yang sudah didapatkan di lapangan.

Tempat Penelitian



Gambar 4. Peta lokasi kampung pemulung Albaraya
Sumber: Pribadi

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Bintara jaya dan Jakasampurna, fokus pengamatan pada lokasi dengan tingkat kekumuhan paling tinggi seluas 3,34 hectare dari total luas kawasan 7 hectare

Metode pengumpulan data

Dilakukan secara langsung di Lapangan (Field Research Method) yaitu mengamati secara langsung pada lokasi studi kasus yang diambil, kemudian diperkuat dengan metode pengumpulan data berbasis internet (Internet Research Method). Yaitu dengan memanfaatkan internet untuk memperkaya informasi, data dan literatur berupa jurnal dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait isu yang sedang diteliti

Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis data yang dilakukan melalui 3 hal:

1. Dengan mereduksi data yang sudah didapat terlebih dahulu, meneliti dan menyaring data apa saja yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan, setelah itu merangkumnya
2. Menyajikan data yang dapat menjadi narasi singkat yang informatif
3. Mengambil kesimpulan dari data yang sudah disajikan

Hasil dan Pembahasan

Melihat dari rumusan masalah yang disusun, maka dibutuhkan strategi yang jitu untuk dapat menangani permasalahan ini, karena jika tidak segera diatasi akan semakin buruk di kemudian hari, semakin luas area kumuh yang berdiri akan menambah buruk dampak yang dihasilkan bagi kawasan ini, terlebih kita hidup dimasa pandemi yang serba susah, dan bagaimana virus *Covid-19* sangat mudah menular di area kumuh dikarenakan kepadatan antar hunian penduduk dan lingkungan yang kurang bersih serta infrastruktur yang kurang memadai akan menambah keruh situasi yang terjadi.

Solusi yang pertama kali dilakukan adalah bagaimana kita bisa merubah manusianya, bagaimana menata penduduk di dalamnya supaya lebih rapi dalam aktivitas sehari-hari sehingga tidak menambah parah kerusakan yang ada. Dikarenakan penduduk disana merupakan pemeran utama dalam terbentuknya lingkungan yang sehat dan indah, menjadi hal yang percuma jika menata kembali lingkungan namun perilaku masyarakatnya masih kurang baik, menata masyarakat dapat dengan banyak hal, seperti penanaman nilai-nilai dengan sosialisasi, memberi norma-norma yang harus ditaati, juga dengan merancang kawasan yang memberi stimulus bagi masyarakat untuk membenahi perilaku yang dianggap kurang tepat dalam kehidupan sehari-hari, hal inilah yang juga dilakukan komunitas mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi UMM dalam menata kembali desa jodipan di malang, dan kini kita dapat hasilnya dengan indahnya desa jodipan yang menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah.



Gambar 5. Kondisi sungai dan lingkungan kampung pemulung Albaraya
Sumber: Penulis

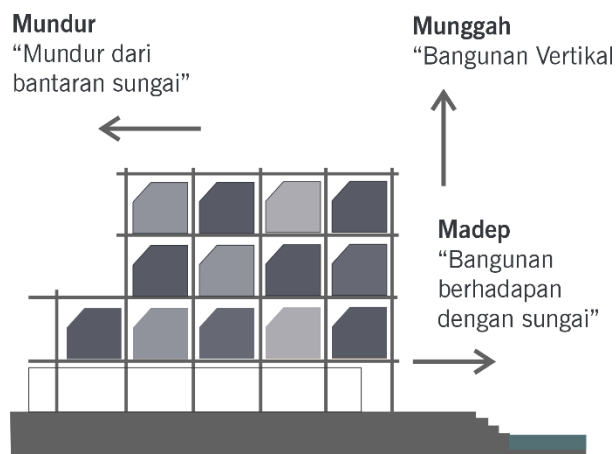
Memperbaiki kawasan dapat dimulai dengan memperbaiki lingkungannya, terutama sungai yang ada, walaupun tidak besar, sungai yang membelah lokasi dengan bentang lebar 3 meter ini sangat tidak bersih dan penuh akan sampah, hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakat yang membuang sampah dan menaruh hasil memulung sembarangan, alhasil banyak penyakit yang tercipta dari buruknya kondisi sungai yang ada, air yang menggenang karena tersumbat sampah menyebabkan banyak jentik nyamuk dan kuman, serta sangat berpotensi untuk banjir ketika terjadi curah hujan yang tinggi di daerah tersebut. Dengan memperbaiki sungai akan memunculkan *sense of belonging* dari warga setempat sehingga menambah gairah untuk terus menjaganya, hal ini sudah terbukti ampuh dari kasus penataan kampung jodipan malang. Setelah itu dapat dilanjutkan dengan merapikan sampah yang ada dengan memberikan lahan khusus pengumpulan sampah supaya tidak berserakan dimana-mana.

Selanjutnya adalah menata hunian masyarakat yang jauh dari kata layak, pasalnya dilihat dari luas area hunian yaitu 3,34ha itu dihuni lebih dari 2800 jiwa, jadi dalam 1 hektar tanah dihuni lebih dari 800 jiwa. Dalam SNI 03-1733-2004 diklasifikasikan jika jumlah penduduk dalam satu hektar lebih dari 400 dikategorikan sebagai kawasan sangat padat di syaratkan untuk dilakukan peremajaan.

SNI 03-1733-2004				
Klasifikasi kawasan	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Padat
Kepadatan penduduk	<150 jiwa/ha	151-200 jiwa/ha	201-400 jiwa/ha	>400 jiwa/ha
Reduksi kebutuhan lahan	-	-	15% maksimal	30% maksimal
Kebutuhan rumah susun	Alternatif (untuk kawasan tertentu)	Disarankan (untuk pusat kegiatan kota dan kawasan tertentu)	Disyaratkan (peremajaan lingkungan permukiman perkotaan)	Disyaratkan (peremajaan lingkungan permukiman perkotaan)

Gambar 6. Tabel klasifikasi kepadatan penduduk
Sumber: SNI 03-1733-2004

Dalam pengamatan langsung di lapangan, penulis melihat bagaimana rumah hunian di bangun seadanya, kebanyakan menggunakan material multiplex dan seng yang sangat rawan roboh, banyak dari rumah hunian yang tidak memiliki pintu dan hanya ditutup kain, penempatan rumah yang berdempetan dengan yang lain ditambah berada di tengah-tengah sampah menambah buruk kondisi hunian yang ada. Maka penataan yang efektif untuk mengatasi permasalahan hunian adalah dengan mendesain hunian vertikal, dengan begitu dapat memaksimalkan ruang dan mengurangi kepadatan antar hunian, karena keterbatasan lahan yang ada juga jumlah penghuni yang sudah sangat banyak, karena hunian berada di bantaran sungai maka konsep hunian vertical juga diperkuat dengan mengadopsi konsep yang sudah berhasil diterapkan di Yogyakarta yaitu 3MK (Munggah, mundur, madep kali), yaitu hunian yang tumbuh ke atas, mundur dari bantaran sungai dan orientasi bangunan menghadap ke sungai, konsep ini sangat bermanfaat untuk memunculkan *sense of belonging* warga terhadap sungai, yang akan mentreatment warga untuk selalu menjaga sungai tersebut dan lingkungannya, karena jika sungai kotor dan tidak terawat akan sangat terlihat dan tentunya mengganggu kenyamanan.



Gambar 7. Ilustrasi konsep 3MK(Munggah,Mundur,Madep Kali)
Sumber: Penulis

Dalam proses penataan kembali kawasan ini, diperlukan partisipasi dari banyak pihak terutama masyarakat kampung Albaraya, didukung dengan stakeholder dan juga pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Proses penataan dapat melalui program KOTAKU yang sudah disusun oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan permukiman kumuh di Indonesia, pengoptimalan program KOTAKU sangat penting untuk kelancaran penataan kembali kawasan ini, dimana kawasan ini sekarang sudah disorot secara nasional juga karena kondisi yang kian hari makin mengkhawatirkan, tak luput dari itu dibutuhkan dana yang besar untuk membangun kembali permukiman bagi 2800 masyarakat pemulung di atas lahan seluas 3,34 hectare ini, pendekatan *Bottom up* dalam program KOTAKU dirasa paling tepat untuk menata kawasan ini, pendekatan ini berbasis pada masyarakat sebagai pemeran utama yang dapat memberi gagasan dalam setiap proses penataan, mulai dari perencanaan sampai evaluasi, sehingga diharapkan proses penataan kawasan akan lebih lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap kalangan.

Kesimpulan

Dari tujuan penelitian dan hasil pembahasan diatas dapat kita ambil kesimpulan

1. Yang dilakukan pertama kali dalam menata kembali permukiman kumuh kampung pemulung Albaraya adalah dengan menata dan merubah perilaku masyarakat disana menjadi lebih rapi dan bersih dalam beraktivitas sehari-hari, karena percuma jika lingkungan ditata tapi perilaku masyarakatnya masih banyak yang kurang tepat. Menata perilaku masyarakat dapat dengan sosialisasi, penanaman norma dan merancang kawasan yang memberi stimulus pada perilaku masyarakat yang baik.
2. Proses selanjutnya adalah dengan menata lingkungan yang ada, dimulai dari sungai yang tercemar dan elemen-elemen lainnya. Kemudian memberi area khusus untuk para pemulung menempatkan sampah hasil dari memulung di kawasan sekitar kampung tersebut.
3. Kemudian dilanjutkan dengan menata hunian masyarakat yang sangat tidak layak dilihat dari aspek kepadatan penduduk yang melebihi kategori yang ditentukan oleh SNI 03-1733-2004, dan disyaratkan untuk segera dilakukan peremajaan atau penataan kawasan hunian. Konsep penataan hunian dapat mengadopsi konsep 3MK (Munggah, mundur, madep kali) yaitu hunian yang tumbuh ke atas, mundur dari bantaran sungai dan orientasi bangunan menghadap ke sungai, konsep ini sangat bermanfaat untuk memunculkan *sense of belonging* warga terhadap sungai, yang akan mentreatment warga untuk selalu menjaga sungai tersebut dan lingkungannya.
4. Proses penataan kawasan kampung pemulung Albaraya melalui program KOTAKU dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, dengan menggunakan pendekatan *Bottom Up*, yaitu pendekatan yang berbasis pada masyarakat sebagai pemeran utama yang dapat memberi gagasan dalam setiap proses penataan.

DAFTAR PUSTAKA

- [BSN] Badan Standarisasi nasional. 2004. SNI 03-1733-2004. Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.
- Kholqi, Ahsanul. 2020. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru). *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 9, no. 02, pp. 141-150, Apr. 2020.
- Kiki, Prisca Wulandari. 2015. Inovasi Pemuda Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Di Kampung Warna-Warni Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol.23, No.3, Hal 300-319, Desember 2017
- Kotaku.pu.go.id. (26 Maret 2015). Permukiman Kumuh dan Upaya Penanganannya. Diakses pada 4 mei 2021, dari <http://kotaku.pu.go.id:8081/wartaarsipdetil.asp?mid=7422&catid=2&>
- Kurniasih, S. 2007. Usaha Perbaikan Pemukiman Kumuh di Petukangan Utara Jakarta Selatan. Jakarta : Teknik Arsitektur Universitas Budi Luhur
- Marosa, Deswari. 2011. Analisis Bakteri Patogen pada Air Sumur Warga: Studi Kasus di Pemukiman Kumuh Kecamatan Semampir Surabaya. *ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga*. 21 Desember 2012.
- Nugroho, Adi. 2017. "Warga kampung pemulung Bekasi tak bisa menikmati Pendidikan dan Kesehatan gratis", <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/02/191038469/cara-membuat-daftar-pustaka?page=all>, diakses pada 4 mei 2021.
- Prahasta, E. (2002). Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografi. Bandung: Penerbit Informatika.
- Syafitri, Riezky. 2017. Analisis Persebaran Kualitas Perumahan Kumuh di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Laporan Tugas Akhir Program Studi Strata I pada Jurusan Geografi Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 16 Oktober 2017.
- Wulandari, Anindita. 2017. Arah Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Berat di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu Kota Bekasi. *JURNAL TEKNIK ITS* Vol. 6, No. 2 (2017)